

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi adalah penerapan dari sebuah kebijakan yang di dalamnya berisi mengenai langkah-langkah dan proses sebuah kegiatan. Dalam hal ini implementasi mempunyai peranan yang penting dalam proses kebijakan dan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, tingkat keberhasilan dari suatu program dapat dilihat dari seberapa maksimal implementasi kebijakannya.

Implementasi kebijakan adalah serangkaian tindak lanjut dari sebuah program yang sudah ditetapkan yang meliputi pengambilan keputusan, tahapan-tahapan strategis maupun operasional yang dilakukan agar terwujud suatu program kebijakan untuk dapat terlaksana sesuai dengan sasaran kebijakan yang sudah ditentukan.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981: 1) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menjadi sebuah masalah publik. (Muklir, 2022)

Dalam proses implementasi akan dilakukan jika tujuan dan sasaran sudah ditetapkan, dimana program kegiatan sudah dirumuskan, disusun secara lengkap dan dana tersedia dan di distribusikan sehingga apa yang ditentukan bisa tercapai. (Muhammad Hasyem, 2022).

Kurikulum yang saat ini sedang digunakan yakni kurikulum dalam masa pemulihan dari kurikulum darurat selama pandemi Covid-19. Kemendikbudristek Nadiem A. Makarim mengeluarkan sebuah kebijakan baru mengenai

penggunaan kurikulum yaitu, Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka di sekolah penggerak untuk meminimalisir ketertinggalan pembelajaran (*learningloss*) pada masa pandemi Covid-19. Sebelum terjadinya pandemi Covid-19 sekolah di Indonesia masih menggunakan Kurikulum 2013. Pada awal pandemi hingga pada tahun 2021 di Indonesia menggunakan Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan) (kemdikbud.go.id).

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 mengatakan bahwa kurikulum adalah serangkaian rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Pada awal tahun pelajaran 2022 Kemendikbudristek mengeluarkan sebuah kebijakan penggunaan Kurikulum Merdeka. Pada tahun 2024 nanti baru akan ditentukan kebijakan baru Kurikulum Nasional berdasarkan hasil dari evaluasi kurikulum yang sudah digunakan sebelumnya. (Kemendikbudristek, 2022).

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang saat ini sedang diperkenalkan secara meluas oleh Kemendikbud kepada tiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Kurikulum ini memang tidak dipaksakan untuk sekaligus diterapkan oleh seluruh sekolah mengingat bahwa kesiapan sekolah tentu berbeda-beda. Akan tetapi, secara bertahap Kurikulum Merdeka kedepannya diharapkan dapat diimplementasikan secara merata pada tiap satuan pendidikan mulai dari tingkat dasar seperti SD dan SMP, kemudian berlanjut ke tingkat SMA/SMK dan sampai ke tingkat Perguruan Tinggi. (Kemendikbudristek, 2022).

Keputusan Mendikbudristek Nomor 262/M/2022 mengenai perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor

56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran dijelaskan bahwa terjadi perubahan kurikulum. Pada keputusan ini di dalamnya memuat struktur Kurikulum Merdeka, aturan terkait pembelajaran dan asesmen, proyek penguatan Profil Pancasila, dan beban guru.

Penerapan tentang Kurikulum Merdeka telah diatur dalam Keputusan Mendikbudristek Nomor 162/M/2021 tentang Sekolah Penggerak. Beberapa mengadakan kegiatan berbagai praktik baik Kurikulum Merdeka dalam bentuk seminar maupun lokakarya secara mandiri. (Alfi Samsudduha, 2023).

Tabel 1.1 Daftar Sekolah Tingkat SMK Di Kota Lhokseumawe

No	Nama Sekolah	Alamat
1.	SMKN 1 Lhokseumawe	Jl. Pramuka, Hagu Teungoh
2.	SMKN 2 Lhokseumawe	Jl. Samudera, Gp. Jawa Lama
3.	SMKN 3 Lhokseumawe	Jl. H.T. Markam, No. 36, Pusong Baru
4.	SMKN 4 Lhokseumawe	Jl. Tgk. Muda Lamkuta, No. 4, Ulee Jalan
5.	SMKN 5 Lhokseumawe	Jl. Kumbang Punteut, No. 5 Kec. Blang Mangat
6.	SMKN 6 Lhokseumawe	Jl. Darussalam, Lr. Tgk Majid, Ulee Jalan
7.	SMKN 7 Lhokseumawe	Jl. Medan-B. Aceh, Blang Panyang
8.	SPK Kesdam IM Lhokseumawe	Jl. Alkali No. 09, Hagu Selatan
	SMK Swasta Ulumuddin	Jl. H. Meunasah Uteunkot Cunda
9.	SMK Swasta Karya Beringin	Jl. Lingkar Waduk, Desa Keudee Aceh

Sumber : <https://www.umm.ac.id>

Berdasarkan jumlah SMK baik yang Negeri maupun Swasta yang ada di Kota Lhokseumawe sebagaimana yang sudah di sebutkan di dalam tabel di atas penulis memfokuskan penelitian hanya di SMK Negeri 1 Kota Lhokseumawe saja.

Kemendikbud juga mendorong sekolah-sekolah yang ada di Indonesia agar berkolaborasi dengan dunia kerja dapat semakin lebih di tingkatkan lagi, di

antaranya melalui kemungkinan kerja sama beasiswa atau ikatan dinas, melakukan Kegiatan Praktik Lapangan (PKL), donasi dalam bentuk peralatan laboratorium, dan lainnya (kspstendik.kemendikbud.go.id)

Tantangan kemampuan guru dalam menguasai fasilitas teknologi berbasis digital, yang seperti arah proses dari Kurikulum Merdeka berbasis teknologi, maka pemberdayaan teknologi digital sudah seharusnya dilakukan dalam layanan pembelajaran. Dalam kondisi inilah, guru sudah mulai mengenal dan memanfaatkan *platform* pembelajaran seperti, *email*, *google form*, *e-learning*, dan lain-lain.

Menurut informasi awal yang peneliti dapat dari Ibu Siti sebagai salah satu guru mata pelajaran agama beliau mengatakan bahwa:

“untuk guru-guru yang mengajar menggunakan kurikulum merdeka ini juga harus lebih peka dengan teknologi pembelajaran yang bisa digunakan, contohnya seperti saya membuat soal-soal secara *online* untuk para siswa agar mereka bisa menjawab soal tersebut secara *online*, hal itu juga sebenarnya mempermudah kami sebagai guru untuk memberikan penilaian, karena nilai-nilai dari hasil jawaban para siswa akan dijumlah otomatis melalui sistem, kami juga merasa dipermudah dengan teknologi yang digunakan. Untuk pengumpulan tugas juga murid-murid bisa menggunakan media seperti *google form*, *email*, ataupun *classroom*.” (Informasi Awal, 05 Agustus 2023).

Berdasarkan informasi awal yang peneliti dapatkan, peneliti bisa mengetahui bahwa dengan diimplementasikan Kurikulum Merdeka ini sangat mempermudah semua pihak dalam proses pembelajaran, tidak hanya guru namun para siswa juga merasa terbantu dengan adanya penggunaan teknologi di dalam proses pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka.

Salah satu karakteristik Kurikulum Merdeka adalah dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk mendukung pengembangan karakter sesuai

dengan Profil Pelajar Pancasila. Dalam Kurikulum Merdeka, sekolah diberikan keleluasaan untuk memberikan proyek-proyek pembelajaran yang relevan dan dekat dengan lingkungan sekolah. Pembelajaran berbasis proyek yang penting untuk pengembangan karakter siswa karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman (*experiential learning*). (Amir Fatah dkk, 2022)

Seperti informasi awal yang peneliti dapat dari Ibu Nadia sebagai salah satu guru mata pelajaran Bahasa Inggris beliau mengatakan bahwa:

“biasanya saya memberikan projek untuk siswa mencari sebuah cerita, karena di Kurikulum Merdeka ini menerapkan Profil Pelajar Pancasila maka mereka hanya mencari cerita-cerita rakyat lokal saja untuk di analisis ataupun dijelaskan maksud dan tujuan berdasarkan cerita-cerita yang mereka cari, kami sebagai guru juga memberikan kebebasan untuk murid mau menggunakan teknologi ataupun media apa saja yang digunakan untuk mencari cerita-cerita tersebut. Dengan adanya proyek ini juga bisa membantu para siswa untuk lebih aktif dan juga bisa berpikir secara kritis terhadap proyek yang digunakan. Lalu media yang digunakan untuk mengirim proyek tersebut bisa saja lewat *google drive* ataupun *email*” (Informasi Awal, 05 Agustus 2023).

Berdasarkan informasi awal di atas dapat diketahui bahwa guru-guru yang mengajar sudah menerapkan proyek kepada para siswa tetapi tetap berpedoman kepada Profil Pelajar Pancasila yang di mana tetap didasarkan kepada nilai-nilai luhur Pancasila dan juga menggunakan kearifan lokal yang tersedia untuk proyek yang dilaksanakan. Untuk media yang digunakan dalam pengiriman proyek tersebut sudah sangat dipermudah dengan menggunakan sistem *online*, tanpa harus menyerahkan hasil proyek secara *offline*.

Menurut data yang peneliti dapatkan dari bagian kepegawaian di SMK Negeri 1 Kota Lhokseumawe terdapat sejumlah pegawai berdasarkan jabatannya di SMK Negeri 1 Kota Lhokseumawe diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Guru di SMK Negeri 1 Kota Lhokseumawe

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	PNS	15	35	50 orang
2.	P3K	10	21	31 orang
3.	Honorar	4	6	10 orang

Sumber: Bagian Kepegawaian SMK Negeri 1 Kota Lhokseumawe

Adapula jumlah siswa dan siswi berdasarkan tingkatan kelas dan jurusanannya yang peneliti dapatkan dari bagian kesiswaan yang berada di SMK Negeri 1 Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

Table 1.3 Jumlah Siswa dan Siswi Kelas X di SMK Negeri 1 Kota Lhokseumawe

No	Kelas	Jumlah Ruangan	Jenis Kelamin		Jumlah Siswa
			Laki-laki	Perempuan	
1.	X PPLG	1	28	7	35
2.	X TJKT	3	95	6	101
3.	X DKV	3	49	29	78
4.	X T.E	1	36	-	36
5.	X AK	2	21	36	57
6.	X MPLB	2	-	71	71
7.	X BD	1	19	13	32
Total		13	248	162	410

Sumber: Bagian Kesiswaan SMK Negeri 1 Kota Lhokseumawe

Table 1.4 Jumlah Siswa dan Siswi Kelas XI di SMK Negeri 1 Kota Lhokseumawe

No	Kelas	Jumlah Ruangan	Jenis Kelamin		Jumlah Siswa
			Laki-laki	Perempuan	
1.	XI PPLG	1	28	3	31
2.	XI TJKT	3	90	-	90
3.	XI DKV	3	47	36	83
4.	XI T.E	1	34	-	34
5.	XI AKL	2	13	39	52

6.	XI MPLB	2	-	31	31
7.	XI BD	1	17	8	25
Total		13	229	117	346

Sumber: Bagian Kesiswaan SMK Negeri 1 Kota Lhokseumawe

Seperti yang sudah dijelaskan pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Kurikulum Merdeka sudah diimplementasikan di kelas X dan XI, lalu jumlah siswa dan siswi di setiap tingkatan kelasnya berbeda-beda. Pada kelas X dan XI sudah menggunakan nama-nama jurusan terbaru yang diartikan sudah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

Berdasarkan penjelasan mengenai Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di atas pasti terdapat beberapa perbedaan yang terjadi di dalam beberapa aspek yang diterapkan dari masing-masing kurikulum seperti yang dijelaskan di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.7 Perbedaan Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 (K13)

Aspek	Kurikulum Merdeka	Kurikulum 2013 (K13)
Kebebasan	Memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih topik dan metode pembelajaran	Kurikulum terstruktur dengan kurikulum inti dan tambahan yang ditentukan
Pendekatan Pembelajaran	Aktif, kolaboratif, dan eksploritas	Berbasis saintifik, berdasarkan masalah, dan kontekstual
Keterlibatan Siswa	Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dan pengambilan keputusan	Siswa lebih sebagai penerima informasi dan pengetahuan dari guru
Penilaian	Menggunakan penilaian non-akademik	Menggunakan penilaian akademik yang lebih terstruktur
Fokus	Pengembangan karakter dan moral siswa	Pengembangan kemampuan akademik siswa secara umum
Struktur	Di fokuskan pada bidang keahlian dan program keahlian saja	Mengacu pada spektrum keahlian SMK yang ditetapkan pemerintah atas bidang keahlian, program

		keahlian dan kompetensi keahlian
Jam pelajaran (JP)	Diatur per tahun atau per fase, alokasi waktu fleksibel untuk mencapai JP	JP diatur per minggu atau per program (3 sampai 4 tahun), alokasi waktu bisa rutin per minggu/semester maupun fleksibel, tetapi ada nilai hasil belajar seluruh mata pelajaran di akhir semester
Muatan Kejuruan	Kelompok mata pelajaran kejuruan di kurikulum merdeka terdiri atas mata pelajaran: 1) Matematika dan bahasa Inggris di Fase E dan F 2) Informatika, proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial, dan dasar-dasar program keahlian di Fase E 3) Proyek kreatif dan kewirausahaan	Muatan mata pelajaran kejuruan di kurikulum 2013 terdiri dari: 1) Kelompok mata pelajaran dasar bidang keahlian dan kelompok mata pelajaran dasar program keahlian di kelas X 2) Kelompok mata pelajaran kompetensi keahlian di kelas XI, XII dan XIII

Sumber: detik.com

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan mengenai kurikulum merdeka dan kurikulum 2013 (K13) yang perbedaan tersebut terletak pada aspek di masing-masing kurikulum. Sedangkan yang dimaksud fase E dan F pada Kurikulum Merdeka di SMK adalah, fase E kurikulum merdeka merupakan fase yang diperuntukkan bagi kelas X, baik di tingkat SMK, SMA, atau sederajat, pada fase ini peserta didik dituntut untuk mampu mengenali potensi serta bakat mereka sebelum masuk ke tingkat kelas yang lebih tinggi. Sementara itu, fase F kurikulum merdeka digunakan bagi kelas XII dan XIII, baik di tingkat SMA, SMK, atau sederajat, pada fase ini peserta didik bisa memilih mata pelajaran yang diminati sesuai dengan minat dan bakatnya.

Dari hasil observasi sementara yang dilakukan pada SMK Negeri 1 Kota Lhokseumawe sekolah tersebut sudah menggunakan kurikulum baru yaitu Kurikulum Merdeka pada Juli 2022, meskipun kurikulum ini masih bisa dikatakan sebagai kurikulum baru, di SMK Negeri 1 Kota Lhokseumawe ini penerapan Kurikulum Merdeka baru dilaksanakan atau dijalankan pada kelas X.

Namun berdasarkan informasi awal yang peneliti dapat dari Ibu Siti Anjarwati sebagai salah satu guru beliau mengatakan bahwa:

“pada awal pemberitahuan di bulan Juli 2022 bahwa ada kebijakan baru yang dimana SMK 1 akan menggunakan Kurikulum Merdeka kami baru menjalankan Kurikulum Merdeka di kelas X saja, namun seiring berjalannya waktu dan kenaikan kelas para siswa, kelas XI sudah menggunakan kurikulum merdeka, namun di kelas XI baru terhitung 3 minggu sejak dimulainya pembelajaran setelah libur pembagian kenaikan kelas” (Informasi Awal, 05 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di SMK Negeri 1 Kota Lhokseumawe sekolah ini awalnya hanya menjalankan Kurikulum Merdeka pada kelas X saja, namun seiring dengan berjalannya waktu kini kelas XI juga sudah mulai menggunakan Kurikulum Merdeka walaupun baru berjalan 3 minggu.

Terdapat beberapa fenomena masalah yang menjadi sebuah kendala dalam pengimplementasian Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 1 Kota Lhokseumawe ini contohnya seperti, guru yang mengajar masih terkesan kaku dengan diterapkannya Kurikulum Merdeka, guru yang mengajar juga kurang mendapat pelatihan khusus untuk Kurikulum Merdeka, dan juga masih ada guru yang tidak mengikuti pelatihan yang sudah disediakan.

Kurikulum merdeka memberikan pembelajaran secara bebas untuk para siswa, kebebasan yang dimaksud adalah siswa boleh memilih materi pembelajaran

yang diminati lalu kemudian membuat proyek yang menghasilkan sebuah karya dan nilai jual agar para siswa dapat berwirausaha.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 1 Kota Lhokseumawe”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang akan mempermudah fokus penelitian ini. Adapun diantaranya sebagai berikut ini :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 1 Kota Lhokseumawe?
2. Apa Yang Menjadi Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 1 Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah penulis angkat diatas, maka penulis memfokuskan penelitian untuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Program Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 1 Kota Lhokseumawe yang difokuskan pada pemberian pelatihan guru-guru berdasarkan indikator komunikasi, sumber daya, dan disposisi.
2. Hambatan dalam Pelaksanaan Program Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 1 Kota Lhokseumawe yang difokuskan pada indikator isi kebijakan dan dukungan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut ini :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Program Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 1 Kota Lhokseumawe yang difokuskan pada indikator komunikasi, sumber daya, dan disposisi.
2. Untuk Mengetahui Yang Menjadi Hambatan di Dalam Pelaksanaan Program Kurikulum Merdeka di SMK Negeri 1 Kota Lhokseumawe yang difokuskan pada indikator isi kebijakan dan dukungan.

1.5 Manfaat Penelitian

Pelaksanaan dari kegiatan ini tentunya memiliki beberapa manfaat, demikian pula dari judul penelitian ini memiliki manfaat antara lain :

1. Manfaat Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan serta untuk penulis bisa menjadi sarana dalam ilmu yang sudah didapatkan dalam perkuliahan dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan.
2. Manfaat Teori, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah relasi dan pengetahuan serta dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya dan sebagai bahan pengembangan teoritis bagi ilmu pengetahuan dan bisa dijadikan sebagai referensi di bidang Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Program Kurikulum Merdeka.

3. Manfaat Praktis, diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah referensi dan dapat memberikan masukan yang bersifat membangun kepada para pihak-pihak ataupun satuan pendidikan yang bersangkutan dalam meningkatkan Implementasian Kebijakan Program Kurikulum Merdeka.